# PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 – 2023

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Berta Pramudita**
**NPM 2156041016**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2025**

# ABSTRAK

## PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 – 2023

**Oleh**

**BERTA PRAMUDITA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro 2018 – 2023. PAD merupakan sumber utama pendanaan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan. Jumlah penduduk yang meningkat memperluas basis pajak dan retribusi, sementara inflasi memengaruhi daya beli serta stabilitas ekonomi. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat membatasi kontribusi masyarakat terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda dan menggunakan alat analisis *E-Views* 13 serta data sekunder panelitian dari BPS Kota Metro pada periode 2018 – 2023. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini mengimplikasikan perlunya optimalisasi PAD dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan inflasi dalam perencanaan keuangan daerah serta pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



**Kata kunci**: **Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Inflasi, Tingkat Kemiskinan.**

## *ABSTRACT*

### *THE EFFECT OF POPULATION, INFLATION, AND POVERTY RATE ON REGIONAL ORIGINAL REVENUE OF METRO CITY (2018 – 2023)*



***By***

**BERTA PRAMUDITA**



*This study aims to examine the influence of population, inflation, and poverty rate on Regional Original Revenue (PAD) in Metro City from 2018 to 2023. PAD is the primary funding source for local governments to achieve fiscal independence and support regional development. An increasing population expands the tax and retribution base, while inflation affects purchasing power and economic stability. Meanwhile, a high poverty rate may limit community contributions to PAD. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis with E-Views 13 and secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) Metro City for the 2018 – 2023 period. The partial (t-test) results indicate that population has a positive and significant effect on PAD, inflation significantly affects PAD, whereas the poverty rate does not have a significant impact. The simultaneous (F-test) results show that population, inflation, and poverty rate variabels collectively have a significant influence on PAD. These findings highlight the need for PAD optimization by considering population growth and inflation in regional financial planning, along with inflation control and economic empowerment strategies.*



***Keywords: Regional Original Revenue, Population, Inflation, Poverty Rate.***

# PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 – 2023

**Oleh**

**Berta Pramudita**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**
**SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara**
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2025**

| | |
|---|---|
| Judul Skripsi | **:PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 – 2023** |
| Nama Mahasiswa | : Berta Pramudita |
| Nomor Pokok Mahasiswa | **:2156041016** |
| Program Studi | **: Ilmu Administrasi Negara** |
| Fakultas | **: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**
NIP. 19710615 200501 1 003

**Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**
NIP. 19840630 201504 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

**Meilyana, S.IP., M.A.**
NIP. 19740520 200112 2 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

   Ketua : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.** .....

   Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A** .....

   Penguji Utama : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.**
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Mei 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Berta Pramudita

NPM. 2156041016

# RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Berta Pramudita, dilahirkan di Margomulyo pada tanggal 25 Desember 2002 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sobari dan Ibu Sri Suyatmi.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Darsa Bakti pada tahun 2007-2009, dilanjutkan di SDN Gunung Sugih Baru pada tahun 2009-2014. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 09 Metro pada tahun 2014-2017 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMK Merah Putih School Kota Metro pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2021.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis mulanya bergabung pada Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP Unila. Pada saat menjadi mahasiswa, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di Kelurahan Gedung Rejo Sakti, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro.

## MOTTO

“Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan, sebelum kamu tidak bisa melakukan apapun.”

(Berta Pramudita)

"Investasikan waktumu untuk belajar karena pengetahuan adalah aset terbesar yang tak ternilai."

(Warren Buffett)

"Jika Anda tidak gagal, Anda tidak mencoba sesuatu yang baru."

(Albert Einstein)

**PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin* telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Mbah tersayang

**Sobari dan Sri Suyatmi serta Mbah Sunarwi dan Mbah Sujianto**

Kakak dan Adikku

**Ayu Vaulanda Agustin, Cahaya Mutiara Ramadhani, Dinar Berlian Mulia Putri**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

# SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2018-2023"**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2018-2023"** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing utama, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing kedua, terimakasih Ibu atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;

3. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji terimakasih Ibu atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara;
7. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
9. Kepada Kedua orang tua Penulis, Ayah Sobari dan Ibu Sri Suyatmi yang selalu mengiringi doa di setiap langkah Penulis. Kepada Mbah Penulis, Mbah Narwi, Mbah Suji, yang selalu mengiringi doa disetiap langkah Penulis;
10. Kepada Kakak dan Kakak Ipar Penulis, Ayu vaulanda Agustin, M.Ivan Dwi Saputra, dan Adik Penulis, Cahaya Mutiara Ramadhani dan Dinar Berlian Mulia Putri, serta keponakan penulis, Muhammad Archio Rey Vanda terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis;
11. Kepada Seluruh ASN dan jajaran Staff Badan Pengelolaan Pajak dann Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya;
12. Kepada yang spesial, terimakasih sudah menemani, mewarnai hari-hari penulis dan membantu dari awal perskripsian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Billah Permana Putra; Sahabat Penulis, Prameswari, Wiska Bela, Alin, Lisel, Bunga, Lutfie Tahta, Inez, Fitria,

Hernani. Terimakasih telah menyediakan waktunya dan membuat hari-hari Penulis lebih indah dan berwarna;

13. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 14 Mei 2025

Penulis,

Berta Pramudita

## DAFTAR ISI


Halaman

**DAFTAR ISI** ..... **i**
**DAFTAR TABEL** ..... **iii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **iv**

**I. PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 15
1.3 Tujuan Penelitian ..... 15
1.4 Manfaat Penelitian ..... 15

**II. TINJAUAN PUSTAKA** ..... **17**
2.1 Pembangunan Daerah ..... 17
2.2 Administrasi Publik ..... 18
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... 19
2.2.1 Komposisis Pendapatan Asli Daerah ..... 21
2.4 Jumlah Penduduk ..... 23
2.5 Inflasi ..... 26
2.6 Tingkat Kemiskinan ..... 29
2.7 Hubungan Antar Variabel ..... 32
2.8 Kerangka Pikir ..... 37
2.9 Hipotesis Penelitian ..... 39

**III. METODE PENELITIAN** ..... **40**
3.1 Pendekatan Penelitian ..... 40
3.2 Definisi Konseptual ..... 40
3.3 Definisi Operasional ..... 41
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 42
3.5 Sumber Data ..... 42
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian ..... 43
3.7 Metode Pengumpulan Data ..... 43
3.8 Variabel Penelitian ..... 44
3.8.1 Variabel Independen ..... 44
3.8.2 Variabel Dependen ..... 44
3.9 Teknik Analisis Data ..... 44
3.9.1 Uji Asumsi Klasik ..... 44
3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda ..... 46

3.9.3 Uji Hipotesis ..... 47

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 49**
4.1 Gambaran Umum Kota Metro ..... 49
4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah..... 49
4.1.2 Pembagian Administratif ..... 50
4.1.3 Iklim dan Topografi ..... 51
4.1.4 Kondisi Hidrologi..... 51
4.1.5 Visi dan Misi Kota Metro ..... 52
4.1.6 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ..... 52
4.1.7 Kondisi Penduduk Kota Metro..... 53
4.1.8 Kondisi Inflasi Kota Metro ..... 53
4.1.9 Kondisi Kemiskinan Kota Metro ..... 54
4.1.10 Kondisi PAD Kota Metro..... 55
4.2 Hasil dan Analisis Data..... 55
4.2.1 Hasil Analisis Data Deskriptif ..... 56
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik..... 58
4.2.3 Hasil Analisis Data Regresi Linear Berganda..... 63
4.2.4 Hasil Data Hipotesis..... 65
4.2.5 Hasil Data Koefisien Determinasi ($R^2$)..... 67
4.3 Pembahasan..... 68
4.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD ..... 68
4.3.2 Pengaruh Inflasi Terhadap PAD) ..... 70
4.3.3 Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap PAD..... 72
4.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap PAD ..... 75

**V. PENUTUP..... 77**
5.1 Kesimpulan ..... 77
5.2 Saran..... 79

**DAFTAR PUSTAKA..... 80**
**LAMPIRAN..... 88**

## DAFTAR TABEL

Tabel Halaman


1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro 2018 – 2023 ..... 4
2. Jumlah Penduduk Kota Metro Tahun 2018 – 2023 ..... 7
3. Inflasi Kota Metro Tahun 2018 – 2023..... 8
4. Tingkat Kemiskinan Kota Metro Tahun 2018 – 2023 ..... 11
5. Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi ..... 48
6. Hasil Analisis Deskriptif..... 56
7. Hasil Uji Multikolinearitas ..... 59
8. Uji *Breush-Pagan-Godfrey*..... 61
9. Uji *Glejser*..... 61
10. Hasil Uji Autokorelasi ..... 62
11. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda ..... 63
12. Hasil Uji t (Parsial) ..... 65
13. Hasil Uji F (Simultan)..... 66
14. Hasil Uji Koefisien Determinasi ($R^2$) ..... 67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir ..... 38
2. Peta Administrasi Kota Metro ..... 49
3. Hasil Uji Normalitas ..... 60

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki kewajiban untuk membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik bagi masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang memadai, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berperan penting dalam menunjang kemandirian fiskal daerah, sehingga peningkatan atau penurunannya dapat mencerminkan kondisi ekonomi suatu wilayah.

Pada konteks pertumbuhan ekonomi, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi PAD, termasuk jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan (Solow, 1956), pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu jumlah penduduk, investasi, dan kemajuan teknologi. Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, asalkan disertai dengan pengelolaan sumber daya yang efisien. Dalam konteks PAD, jumlah penduduk yang besar berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi melalui konsumsi barang dan jasa yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat memperbesar penerimaan daerah.

Menurut Keynesian Economics (Keynes, 1936), inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, melemahkan aktivitas bisnis, dan mengurangi penerimaan pajak dari sektor perdagangan serta jasa. Keynes (1936) menyebutkan bahwa inflasi memiliki dampak beragam terhadap PAD. Inflasi moderat mendorong ekspansi bisnis dan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal ini berkontribusi pada PAD melalui pajak daerah. Namun, hiperinflasi justru memicu ketidakstabilan ekonomi, menurunkan daya beli, serta menghambat investasi, yang pada akhirnya berdampak negatif pada penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, inflasi yang tidak terkendali meningkatkan biaya operasional usaha, memperlambat investasi, dan berdampak negatif terhadap penerimaan daerah, terutama dari sektor retribusi dan pajak daerah.

Sementara itu, teori kapasitas fiskal (Musgrave, 1989) menegaskan bahwa kapasitas fiskal suatu wilayah, termasuk PAD, sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, daya beli, dan tingkat kemiskinan. Jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang besar dengan daya beli yang tinggi, potensi PAD melalui pajak daerah dan retribusi akan semakin meningkat. Perkembangan usaha dan industri yang didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakat juga berkontribusi terhadap penerimaan pajak dari sektor bisnis dan properti, yang pada akhirnya memperkuat keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dengan pengelolaan PAD yang baik, pemerintah daerah dapat mendanai proyek pembangunan yang mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup, mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan ekonomi serta sosial di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar daerah memiliki fleksibilitas dalam merancang kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah adalah PAD, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi global. Inflasi mengurangi daya

beli masyarakat dan berpengaruh pada pendapatan daerah karena menurunnya kontribusi pajak dan retribusi (Simanungkalit, 2020). Pada 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 270 juta dengan tingkat kemiskinan 9,8%, dan inflasi diperkirakan 4,5%, yang memengaruhi daya beli masyarakat (Bps.go.id, 2023). PAD dipengaruhi oleh sumber daya alam, kebijakan fiskal, dan partisipasi masyarakat dalam pajak daerah.

Pemulihan ekonomi yang berlangsung memengaruhi kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus ekonomi dari pemerintah. Ketidakpastian global juga memengaruhi kestabilan ekonomi domestik, sehingga pemerintah perlu hati-hati dalam merancang kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi tanpa menambah beban sosial atau memengaruhi PAD di berbagai wilayah Indonesia (Yunus, 2021). PAD merupakan sumber utama pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam memberikan layanan publik.

PAD yang tinggi dapat mengurangi ketergantungan daerah pada transfer dari pemerintah pusat, memberikan lebih banyak kebebasan dalam merancang kebijakan pembangunan lokal (Purba & Manurung, 2023). PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Oktiani & Al Muhariah, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain PAD yang sah, PAD ini digunakan untuk tujuan agar suatu daerah lebih leluasa dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah (Ernita, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah.

Daerah dengan perolehan PAD yang tinggi cenderung memiliki kemandirian ekonomi yang lebih baik, yang menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang positif. Akan tetapi, ada juga dari fakta yang terjadi dalam suatu wilayah masih sulit menyeimbangkan jumlah PAD sehingga ketidakseimbangan ini akan dapat menimbulkan ketidakmerataan pembangunan daerah. Di mana faktor penyebab terjadinya adalah adanya perbedaan potensi yang dimiliki pada setiap daerah.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki perkembangan signifikan dalam faktor optimalisasi PAD adalah Kota Metro. Kota Metro yang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro 2018 – 2023**

| No | Th | Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro Menurut PAD (Ribu Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Lain-lain PAD Yang Sah | Jumlah |
| 1 | 2018 | 21.731.062,46 | 5.604.726,99 | 4.342.620,32 | 100.523.866,25 | 132.202.276,03 |
| 2 | 2019 | 27.205.358,06 | 5.631.840,65 | 4.894.552,26 | 138.467.573,20 | 176.119.324,17 |
| 3 | 2020 | 28.845.377,14 | 7.036.397,90 | 5.562.613,44 | 180.201.312,58 | 221.645.701,09 |
| 4 | 2021 | 33.105.926,63 | 7.879.918,10 | 7.340.250,54 | 225.517.952,87 | 273.844.048,14 |
| 5 | 2022 | 36.716.010,32 | 7.793.234,27 | 6.733.816,46 | 188.593.803,85 | 239.836.864,91 |
| 6 | 2023 | 41.299.877,12 | 7.942.159,85 | 6.663.816,27 | 228.357.103,70 | 284.262.956,96 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2023.*

Berdasarkan hasil tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi PAD di Kota Metro terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kota Metro memiliki sejumlah potensi sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Pajak daerah menjadi salah satu sumber PAD utama, yang mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber PAD yang ada, meskipun tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal masih terus menjadi perhatian. Namun, meskipun kontribusi pajak daerah terus

meningkat, masih terdapat kesenjangan antara potensi yang ada dengan pencapaian yang tercatat.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro, realisasi PAD pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp50,4 miliar, meningkat sekitar 12% dibandingkan tahun sebelumnya (BPKAD Kota Metro, 2023). Peningkatan ini sebagian besar berasal dari pajak hotel dan restoran, yang sejalan dengan berkembangnya sektor pariwisata dan perdagangan di kota tersebut. Namun, pajak dari sektor hiburan dan parkir masih jauh dari potensi maksimal. Misalnya, pajak hiburan di Kota Metro pada tahun 2023 hanya tercatat sebesar Rp1,2 miliar, sementara potensi yang ada bisa lebih besar seiring dengan perkembangan sektor pariwisata dan kegiatan masyarakat yang semakin berkembang (BPKAD Kota Metro, 2023).

Sementara itu, sektor retribusi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Metro, meskipun belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Retribusi pasar, retribusi tempat parkir menjadi beberapa jenis retribusi yang memberikan kontribusi penting, akan tetapi pemungutannya masih terkendala oleh sistem yang kurang efisien dan pengawasan yang terbatas. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah retribusi pasar tradisional, yang meskipun memiliki potensi besar, sering kali tidak tercatat dengan akurat karena ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi di lapangan.

Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah, seperti aset tanah dan bangunan milik pemerintah kota, juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Pemanfaatan aset ini, jika dikelola dengan lebih baik, dapat menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan. Namun, sampai saat ini, pemanfaatan aset daerah di Kota Metro masih terbatas pada beberapa bidang, seperti penyewaan gedung dan tanah untuk kegiatan komersial, yang belum dieksplorasi secara maksimal. Bahkan, beberapa aset milik daerah masih belum tercatat dengan jelas dalam sistem informasi yang ada, yang

mengarah pada potensi kebocoran dan pengelolaan yang kurang optimal (BPKAD Kota Metro, 2023). Meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam realisasi PAD, pemerintah Kota Metro masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan potensi-potensi PAD yang ada.

Faktor utama yang menghambat optimalisasi ini antara lain adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Pajak parkir yang seharusnya dapat menjadi salah satu sumber PAD utama, sering kali tidak tercatat dengan baik akibat pengelolaan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem elektronik. Hal ini mencerminkan perlunya pembenahan dalam sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan pendapatan daerah (info.metrokota.go.id, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun Kota Metro menunjukkan hasil positif dalam peningkatan PAD, potensi yang ada masih jauh dari maksimal dan perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih terarah. Pengelolaan PAD di Kota Metro sangat penting untuk mengidentifikasi potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, serta menemukan solusi praktis yang dapat meningkatkan kontribusi PAD bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kota Metro diharapkan dapat terus memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta mengembangkan sumber PAD baru yang lebih inovatif, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah di masa depan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD salah satunya adalah jumlah penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Bps.go.id, 2021). Menurut Fitri (2021) penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, moralitas dan migrasi.

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktivitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya.

Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Metro Tahun 2018 – 2023**

| No | Tahun | Jenis Kelamin | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | 2018 | 82.494 | 82.699 | 165.193 |
| 2 | 2019 | 165.193 | 83.815 | 167.411 |
| 3 | 2020 | 84.806 | 83.870 | 168.676 |
| 4 | 2021 | 85.307 | 84.474 | 169.781 |
| 5 | 2022 | 86.430 | 85.570 | 172.000 |
| 6 | 2023 | 86.568 | 85.937 | 172.505 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2023.*

Berdasarkan hasil tabel 2 di atas menujukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Metro tercatat setiap tahunnya mengalami peningkatan baik itu jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan. Pertumbuhan populasi yang terus berkembang ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti migrasi penduduk, tingkat kelahiran yang tinggi, serta peningkatan harapan hidup di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah penduduk juga akan memengaruhi berbagai sektor, seperti kebutuhan akan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta lapangan pekerjaan.

Menurut Gusti (2024) menyebutkan bahwa jumlah penduduk suatu daerah memengaruhi efisiensi pemanfaatan sumber daya dan produksi. Jika jumlah penduduk sedikit, sumber daya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga produksi besar-besaran sulit tercapai. Sebaliknya, jika jumlah penduduk terlalu banyak *(over population)*, meskipun sumber daya dapat dimanfaatkan lebih efisien, pembagian hasilnya akan lebih kecil. Oleh karena itu, jumlah penduduk berperan penting dalam menentukan besarnya produksi dan PAD.

Konsumsi yang meningkat akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa lokal, yang pada gilirannya dapat memperluas basis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, retribusi pasar, dan pajak hiburan (Priyono & Handayani, 2021). Selain itu, Andiana (2021) juga menyebutkan bahwa

bertambahnya jumlah penduduk juga dapat mendorong berkembangnya sektor usaha dan industri, yang berkontribusi pada penerimaan PAD dari pajak usaha dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selain jumlah penduduk, PAD juga dipengaruhi oleh faktor inflasi. Meningkatnya aktivitas penduduk Kota Metro akan menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap permintaan barang dan jasa, sehingga permintaan yang berlebihan ini akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi ini akan memicu kondisi perekonomian yang buruk jika tidak ada pengendalian yang dilakukan. Tingkat inflasi yang aman adalah kurang dari 10% dan jika melebihi 25% akan memicu adanya kenaikan harga dari barang ataupun jasa dan juga menyebabkan nilai tukar rupiah menurun. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sari, et al., 2021). Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya adalah penurunan pendapatan rill (Rinanda & Pangeran, 2023). Adanya inflasi dapat membuat upah atau gaji naik, karena upah rill tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga.

**Tabel 3. Inflasi Kota Metro Tahun 2018 – 2023**

| No | | Laju Inflasi Kota Metro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bulan** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Januari | 0.48 | 0.14 | 1.15 | 0.53 | 0.55 | 0.76 |
| 2 | Februari | 0.19 | -0.04 | 0.19 | 0.29 | -0.2 | 0.16 |
| 3 | Maret | 0.17 | 0.16 | 0.27 | -0.33 | 0.86 | -0.22 |
| 4 | April | -0.12 | 0.52 | -0.23 | -0.14 | 1.23 | 0.3 |
| 5 | Mei | -0.33 | 0.49 | -0.35 | 0.64 | 0.64 | 0.25 |
| 6 | Juni | 0.52 | 0.48 | 0.26 | 0.07 | 1.07 | 0.01 |
| 7 | Juli | -0.05 | 0.42 | 0.11 | 0.26 | 0.58 | 0.24 |
| 8 | Agustus | 0.2 | 0.41 | 0.06 | -0.28 | -0.94 | -0.07 |
| 9 | September | -0.19 | -0.31 | 0.1 | -0.11 | 1.01 | 0.33 |
| 10 | Oktober | 0.22 | -0.1 | 0.05 | 0.32 | -0.2 | 0.44 |
| 11 | November | 0.27 | 0.36 | 0.4 | 0.48 | 0.05 | 0.83 |
| 12 | Desember | 0.27 | 0.4 | 0.51 | 0.99 | 0.63 | -0.03 |
| **Tahunan** | | **1.64** | **2.97** | **2.53** | **2.74** | **5.37** | **3.05** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2023.*

Berdasarkan hasil data tabel 3, menunjukkan bahwa Pada tahun 2018, inflasi tahunan Kota Metro tercatat sebesar 1,64%. Sepanjang tahun, tingkat inflasi cenderung stabil, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 0,52%, sedangkan deflasi terendah terjadi pada bulan Mei sebesar -0,33%. Tahun berikutnya, yaitu 2019, inflasi tahunan meningkat menjadi 2,97%, dengan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan April tercatat inflasi sebesar 0,52%, sedangkan deflasi terendah terjadi pada bulan September sebesar -0,31%.

Tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan inflasi tahunan menjadi 2,53%. Meski begitu, pola fluktuasi bulanan tetap terlihat. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan angka 0,51%, sementara deflasi terendah tercatat pada bulan April sebesar -0,35%. Pada tahun 2021, inflasi tahunan kembali meningkat ke angka 2,74%. Bulan Desember mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,99%, sedangkan deflasi signifikan terjadi pada bulan Maret sebesar -0,33%.

Tahun 2022 mencatat lonjakan inflasi tahunan yang sangat tinggi, mencapai 5,37%. Hal ini mungkin disebabkan oleh tekanan harga yang meningkat secara signifikan pada beberapa sektor. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 1,23%, sementara deflasi terendah tercatat pada bulan Agustus sebesar -0,94%. Memasuki tahun 2023, inflasi tahunan mulai menunjukkan penurunan menjadi 3,05%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 0,83%, sementara bulan Desember mencatat deflasi sebesar -0,03%. Inflasi Kota Metro menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan peningkatan tajam pada tahun 2022 yang kemudian berhasil dikendalikan pada tahun berikutnya, faktor inflasi ini tetap memengaruhi daya beli masyarakat, yang berpotensi berdampak pada PAD Kota Metro.

Inflasi ini memiliki dampak pada PAD yang di mana terdapat kenaikan harga pada komoditas utama seperti makanan dan perawatan pribadi dapat memengaruhi pendapatan masyarakat, yang berujung pada fluktuasi dalam pajak dan retribusi yang merupakan sumber PAD. Menurunnya inflasi di

2021 dan 2022 (terutama di kelompok makanan dan tembakau) bisa berkontribusi pada kestabilan ekonomi lokal, sehingga memberikan kesempatan bagi peningkatan PAD melalui transaksi ekonomi yang lebih stabil dan konsumsi yang lebih terjaga. Peningkatan jumlah koperasi aktif di Kota Metro dari 91 pada 2020 menjadi 178 pada 2022 menunjukkan adanya potensi ekonomi yang berkembang. Koperasi ini bisa berkontribusi pada PAD melalui kegiatan ekonomi dan perputaran uang di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, meskipun inflasi cenderung menurun, faktor-faktor seperti perubahan harga barang dan perkembangan sektor koperasi dapat memengaruhi perolehan PAD Kota Metro, yang bergantung pada daya beli masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Inflasi yang lebih tinggi pada kategori kebutuhan pokok (seperti makanan dan minuman) dapat menyebabkan penurunan daya beli, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pemasukan PAD dari sektor-sektor lain yang sifatnya bukan kebutuhan pokok. Untuk itu Kota Metro perlu berupaya untuk mengembangkan sumber PAD yang lebih beragam atau memberikan insentif pada sektor-sektor tertentu untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi PAD adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengacu pada persentase atau proporsi penduduk di suatu wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Fitriyanti & Handayani, 2021). Pengukuran tingkat kemiskinan dilakukan dengan melihat pengeluaran atau pendapatan penduduk dalam periode waktu tertentu. Angka ini menjadi indikator penting dalam memahami kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah dan digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan (Priambdo, 2022).

**Tabel 4. Tingkat Kemiskinan Kota Metro Tahun 2018 – 2023**

| No | Komponen Kemiskinan | Kemiskinan Di Kota Metro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | 15.06 | 14.49 | 14.31 | 15.32 | 13.68 | 12.8 |
| 2 | Persentase Penduduk Miskin | 9.14 | 8.68 | 8.47 | 8.93 | 7.87 | 7.28 |
| 3 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 1.61 | 1.14 | 0.94 | 1.27 | 0.87 | 1.12 |
| 4 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0.42 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.24 |
| 5 | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | **360656** | **371636** | **406351** | **417861** | **449415** | **480830** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2023.*

Berdasarkan hasil data tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kota Metro tercatat sebanyak 15,06 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,14%. Garis kemiskinan pada tahun tersebut adalah Rp 360.656 per kapita per bulan. Tahun berikutnya, yaitu 2019, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 14,49 ribu jiwa atau 8,68%, dengan garis kemiskinan yang sedikit meningkat menjadi Rp 371.636 per kapita per bulan.

Selanjutnya, pada tahun 2020, penurunan jumlah penduduk miskin berlanjut, dengan angka mencapai 14,31 ribu jiwa (8,47%). Meski begitu, garis kemiskinan terus meningkat menjadi Rp 406.351. Namun, tahun 2021 menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 15,32 ribu jiwa (8,93%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kondisi ekonomi.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin menurun drastis ke angka 13,68 ribu jiwa atau 7,87%, mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang signifikan. Garis kemiskinan pada tahun ini meningkat menjadi Rp 449.415 per kapita per bulan. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 12,8 ribu jiwa (7,28%). Pada tahun ini, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 480.830 per kapita per bulan, yang merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kota Metro menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021 akibat dampak pandemi. Penurunan ini didukung oleh kenaikan garis kemiskinan yang mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. Masalah sosial ekonomi selalu berhubungan dengan kemiskinan. Meski pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berusaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pada kenyataanya Indonesia masih belum bisa melepaskan belenggu dari masalah kemiskinan. Untuk itu kemiskinan dipandang sesuatu yang harus gencar diupayakan karena sangat berdampak pada pembangunan ekonomi. Adanya kemiskinan berdampak pada angka kriminalitas dan pengangguran yang tinggi, banyak anak yang tidak mendapat pendidikan selayaknya, peningkatan angka kematian, serta konflik di masyarakat yang akan berdampak pada penghasilan asli daerah Kota Metro.

Meskipun Kota Metro berukuran relatif kecil, perkembangannya cukup pesat dan sangat bergantung pada PAD sebagai sumber utama pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi PAD di Kota Metro. Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan inflasi berkaitan erat dengan potensi Kota Metro dalam meningkatkan PAD. Pada pertumbuhan penduduk, dapat memicu peningkatan kebutuhan layanan publik dan infrastruktur, yang dapat mendukung pertumbuhan PAD jika dikelola dengan baik. Sementara itu, tingkat kemiskinan mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan potensi ekonomi daerah, tingginya kemiskinan cenderung membatasi kontribusi masyarakat terhadap PAD melalui pajak dan retribusi. Selain itu, inflasi memengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi, yang berdampak pada pendapatan pemerintah dari sektor-sektor ekonomi.

Sebagai dasar untuk memahami hubungan antara jumlah penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji faktor-faktor tersebut di berbagai wilayah dengan hasil yang relevan. Penelitian terdahulu menjadi referensi penting untuk memperkaya teori dalam kajian yang dimana

penelitian Priyono & Handayani (2021) menunjukkan bahwa PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk secara signifikan memengaruhi PAD di Eks-Karesidenan Pati, dengan jumlah penduduk memiliki pengaruh terbesar. Penelitian ini serupa dalam metode kuantitatif, tetapi berbeda karena penelitian saat ini menambahkan variabel tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Oktiani & Al Muhariah (2021) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD di Sumatera Selatan, sedangkan inflasi tidak. Penelitian ini berbeda karena tidak mencakup tingkat kemiskinan. Sementara itu, Priambodo (2022) menemukan tingkat kemiskinan berdampak 43,69% terhadap PAD Kabupaten Purbalingga, tetapi hanya menggunakan satu variabel independen, berbeda dengan penelitian ini yang mencakup jumlah penduduk dan inflasi. Rukmana & Imaningsih (2023) mengkaji hubungan antara pengangguran, PAD, dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini berbeda karena menggunakan variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ernita (2021) menemukan inflasi dan PDRB berpengaruh pada PAD Kabupaten Kerinci, tetapi lokasi dan variabel yang digunakan berbeda dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara lebih mendalam mengenai pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan terhadap PAD.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan Ilmu Administrasi Negara yang menjadi salah satu cabang ilmu yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan perumusan kebijakan, Ilmu Administrasi Negara berupaya memahami serta mengelola berbagai aspek pembangunan daerah secara menyeluruh. Fokus utama penelitian ini mencakup upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas

keuangan daerah. Untuk itu penelitian ini sesuai dengan cakupan kajian Administrasi Negara, terutama dalam memberikan wawasan yang komprehensif tentang pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Penelitian ini diangkat karena peran strategis PAD sebagai indikator kemandirian suatu wilayah dalam kerangka desentralisasi. Kota Metro sebagai wilayah yang tengah berkembang di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan PAD di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, termasuk fluktuasi inflasi dan tingkat kemiskinan. Dalam konteks tersebut, PAD memiliki peran penting sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Relevansi penelitian ini dengan Ilmu Administrasi Negara dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang berkaitan dengan aspek tata kelola fiskal yang merupakan bagian penting dari administrasi publik. Analisis terhadap PAD terkait erat dengan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini juga mendukung dimensi kebijakan publik yang hasilnya dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis, seperti program pengentasan kemiskinan atau pengendalian inflasi, untuk mendukung peningkatan PAD. Terakhir, penelitian ini juga relevan terhadap dimensi pelayanan publik, karena pengelolaan PAD yang optimal akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, penelitian terkait pengelolaan PAD di Kota Metro sangat penting untuk mengidentifikasi potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal serta menemukan solusi praktis yang dapat meningkatkan kontribusi PAD bagi pembangunan daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, dan Inflasi**

**Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Pada Tahun 2018 – 2023".**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023?
3. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023?
4. Apakah jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh inflasi terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023
4. Untuk mengetahui besaran pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan positif bagi pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengevaluasi PAD, jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan di Kota Metro

yang dapat memformulasikan strategi kebijakan yang dapat membangun persepsi positif masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut.

2. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat menambah referensi serta wawasan bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara, jumlah penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, serta PAD dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pembangunan Daerah

Pembangunan secara tradisional didefinisikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Di tingkat daerah, pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Asep, et al., (2024) menyebutkan bahwa paradigma pembangunan modern menawarkan pendekatan berbeda dan memiliki fokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, dan penurunan tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta identifikasi pasar baru (Lase, et al., 2024).

Menurut Assagaf, et al., (2020) pembangunan daerah harus memperhatikan keunggulan lokal dan karakteristik spesifik wilayah. Tujuannya mencakup peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yang dapat menarik investasi baru dan mendorong aktivitas ekonomi lebih tinggi. Akbar, et al., (2023) menyebutkan bahwa pembangunan daerah bertujuan memaksimalkan potensi lokal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi merata, dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki kewenangan mengelola sumber daya finansial melalui PAD. Sumber daya lokal seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset menjadi instrumen utama pembangunan berkelanjutan. Jatnika, et al., (2024) menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada sumber daya, tetapi juga kebijakan adaptif terhadap kondisi ekonomi dan demografi. Variabel seperti jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan memengaruhi kapasitas ekonomi daerah dalam

meningkatkan PAD. Strategi pembangunan daerah mencakup beberapa aspek utama (Asep, et al., 2024):

1. Pengembangan fisik atau lokalitas: memperbaiki infrastruktur untuk mendukung industri, perdagangan, dan meningkatkan kualitas hidup.
2. Pengembangan dunia usaha: memperkuat daya tarik ekonomi melalui pengembangan sektor usaha.
3. Pengembangan SDM: meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai elemen inti pembangunan.
4. Pengembangan ekonomi masyarakat: memberdayakan masyarakat melalui proyek padat karya dan kegiatan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Diatmika & Rahayu (2022) nilai inti pembangunan mencakup:

1. Ketahanan *(sustenance):* pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.
2. Harga diri *(self-esteem):* meningkatkan martabat manusia di wilayah pembangunan.
3. Kebebasan *(freedom):* memberi ruang individu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Penelitian ini menggunakan teori pembangunan daerah untuk menganalisis bagaimana jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan memengaruhi PAD di Kota Metro. Pendekatan ini relevan karena menjelaskan bagaimana interaksi faktor-faktor ekonomi dan demografi dapat dioptimalkan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

## 2.2 Administrasi Publik

Teori administrasi publik berfokus pada pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Ichsan, et al., (2021) fungsi administrasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan

PAD, teori ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam memastikan penerimaan daerah dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan.

Pendekatan modern dalam administrasi publik, seperti *New Publik Management (NPM)*, menekankan perlunya inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah (Hildawati, et al., 2024). Pengelolaan PAD harus didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Selain itu, kebijakan publik yang dirancang berdasarkan data empiris, seperti hasil analisis pengaruh inflasi dan kemiskinan terhadap PAD, menjadi elemen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini menggunakan teori administrasi publik untuk menilai bagaimana pemerintah Kota Metro mengelola PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pendekatan ini juga relevan dalam mengevaluasi peran kebijakan publik dalam mengatasi tantangan yang muncul dari dinamika ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

## 2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad, 2022). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dari Undang-Undang. PAD adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah (Hafandi & Romadhon, 2020). Pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat tercapai dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam hal pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Kenaikan PAD diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Secara umum, terdapat

hubungan yang saling mendukung dan sejalan antara peningkatan PAD dan peningkatan anggaran daerah untuk pembangunan wilayah.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari potensi ekonomi daerah, seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Maulina, et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber sah lainnya. PAD digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam hal kemandirian finansial, adalah faktor penting untuk menilai sejauh mana daerah dapat mengelola urusan administrasinya. Tanpa anggaran yang memadai, pemerintah daerah tidak akan dapat menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan dengan efektif.

PAD diperoleh dari berbagai sumber pajak, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memiliki peran yang krusial karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Identifikasi sumber PAD meliputi analisis dan pengelolaan yang baik untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Semua penerimaan yang diterima oleh suatu daerah, baik yang berupa peningkatan aktiva maupun pengurangan utang dari berbagai sumber selama satu periode anggaran tahunan, dapat disebut sebagai pendapatan. Dengan demikian, PAD dapat diartikan sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari perekonomian lokal di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber ekonomi yang ada di wilayahnya, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. PAD mencakup berbagai jenis pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan daerah,

dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD sangat penting bagi kemampuan keuangan daerah, karena dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta mendukung kemandirian finansial daerah dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik.

### 2.3.1 Komposisi Pendapatan Asli Daerah

Komposisi PAD mencakup berbagai sumber utama, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Di antara keempat sumber ini, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama PAD, seperti uraian berikut:

a. Pajak Daerah

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kewajiban yang dibayar oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang sebanding, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah mencakup berbagai jenis, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, dan reklame. Di tingkat kabupaten/kota, jenis pajak tidak terbatas, yang berarti daerah memiliki peluang untuk menggali potensi pendapatan tambahan yang tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang, dengan menetapkan pajak baru yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, pajak daerah juga mencakup sumber-sumber lain, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah, dan pajak air permukaan (Manangin, et al., 2023).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau perizinan tertentu yang

langsung dapat dirasakan oleh pihak yang membayar retribusi. Perbedaan utama antara pajak dan retribusi adalah adanya timbal balik langsung dalam retribusi, sementara pajak tidak memberikan imbalan langsung. Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari retribusi mencakup berbagai jenis, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penggunaan kekayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan, penjualan produk usaha daerah, serta perizinan pelayanan dan pengendalian (Hafandi & Romadhon, 2020). Retribusi daerah dibagi menjadi tiga kategori:

1. Retribusi Jasa Umum: pungutan untuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar.
2. Retribusi Jasa Usaha: Pungutan terkait penyediaan layanan yang tidak memadai oleh sektor swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah, berupa penyediaan tempat kegiatan usaha, pelayanan rumah potong hewan, penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dan sebagainya.
3. Retribusi Perizinan Tertentu: pungutan untuk pemberian izin yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan penggunaan ruang, sumber daya alam, serta fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengacu pada laba atau keuntungan yang diperoleh dari perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD), perusahaan daerah, dividen dari Bank Perkreditan Rakyat-Bank Koperasi dan Kredit Kecamatan (BPR-BKK), dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (Hafandi & Romadhon, 2020). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang No. 01 Tahun 2022 mengatur jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang meliputi bagian laba dari investasi pada perusahaan milik daerah atau BUMD, serta perusahaan swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PAD yang sah merupakan bentuk penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber lain yang dimiliki oleh daerah mencakup pendapatan dari penjualan aset milik daerah dan penerimaan dari jasa giro. PAD yang sah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi jenis penerimaan lainnya, seperti:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan dari jasa giro
3. Pendapatan dari pengembalian
4. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum
5. Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai

Pendapatan ini diperoleh melalui penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pengembalian, fasilitas sosial dan umum, serta asuransi kesehatan pegawai. Secara keseluruhan, PAD mencakup berbagai sumber pendapatan yang sangat penting untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang berperan dalam kelangsungan dan kemajuan daerah tersebut.

## 2.4 Jumlah Penduduk

Menurut Suaidah, et al., (2022) penduduk merupakan orang yang tinggal di wilayah Indonesia selama enam bulan atau lebih, serta mereka yang tinggal kurang dari enam bulan dengan tujuan untuk menetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, penduduk mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di

Indonesia. Penduduk di suatu daerah, baik WNI maupun WNA, terikat pada aspek sosial, budaya, politik, serta hak dan kewajiban setempat. Penghitungan jumlah penduduk dilakukan melalui sensus atau metode pertumbuhan penduduk, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pendataan setiap lima tahun, biasanya dengan mendatangi rumah-rumah untuk mencatat jumlah anggota keluarga (Lusiana, et al., 2021). Pertumbuhan penduduk yang pesat di negara maju tersebut berkontribusi pada kemajuan ekonomi karena didukung oleh faktor-faktor seperti jumlah buruh yang terbatas dan modal yang melimpah.

Penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, sebagai pelaku pembangunan dan penerima manfaatnya. Jumlah penduduk dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, di mana kepadatan penduduk dapat menyebabkan masalah pengangguran, sementara jumlah penduduk yang sedikit dapat menghambat tenaga kerja. Penduduk juga berfungsi sebagai sumber daya produksi dan konsumen. Dalam perkembangan zaman, kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, jumlah penduduk penting untuk alasan politik (keamanan dan kekuatan negara), sosial (pelayanan yang diperlukan), dan ekonomis (keseimbangan dengan sumber daya alam, perencanaan ekonomi, dan tenaga kerja). Untuk mengetahui jumlah penduduk, sensus atau cacah jiwa dilakukan, yang juga membantu menentukan apakah negara memiliki kepadatan penduduk yang tinggi atau rendah.

Terdapat dua jenis sensus untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara, menurut Aini (2020), yaitu:

1. Sensus *de facto*: menghitung semua orang yang berada di negara tersebut pada saat sensus, termasuk warga negara, warga negara asing, dan turis. Negara-negara Eropa biasanya menggunakan sensus ini.
2. Sensus *de jure*: Menghitung penduduk yang tinggal tetap di negara tersebut, baik warga negara maupun warga negara asing. Sensus ini tidak menghitung turis atau orang sementara yang berada di negara

tersebut. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Utara sering menggunakan sensus ini, dan hasilnya lebih akurat untuk perencanaan ekonomi.

Teori penduduk optimum menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang ideal adalah yang dapat memaksimalkan penghasilan riil per kapita (Sari, et al., 2022). Jika jumlah penduduk terlalu sedikit, pasar untuk hasil produksi akan sempit, sedangkan jika terlalu banyak, akan terjadi penurunan hasil per kapita karena hukum hasil yang menurun. Teori ini menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk dan pendapatan per kapita, meskipun tidak ada cara pasti untuk menentukan jumlah penduduk optimum karena faktor-faktor seperti teknologi dan sumber daya alam dapat berubah.

Menurut Budiharjo (2019), jumlah penduduk yang besar di Indonesia dapat menjadi aset jika mendukung produksi nasional, tetapi bisa juga menjadi beban jika struktur, persebaran, dan kualitasnya rendah, yang hanya menuntut pelayanan sosial. Ilmu kependudukan (demografi) menarik perhatian ahli ekonomi karena penduduk berperan dalam kegiatan ekonomi. Kualitas dan kuantitas penduduk menentukan kemampuan produksi dan standar hidup suatu negara, serta menjadi sumber tenaga kerja dan keterampilan manajerial (Prayogo & Hasmarini, 2022).

Menurut Gusti (2024) jumlah penduduk adalah input potensial untuk meningkatkan produksi. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan dengan tujuan menetap. Jumlah penduduk mengacu pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah secara sah, baik sebagai warga negara atau bukan. Di negara berkembang seperti Indonesia, hubungan antara kependudukan dan pembangunan ekonomi bergantung pada masalah dan tantangan kependudukan yang khas setiap negara.

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga indikator atau komponen utama:

1. Fertilitas (kelahiran): kelahiran yang tinggi menambah jumlah penduduk.
2. Mortalitas (kematian): kematian mengurangi jumlah penduduk dan penting untuk perencanaan pembangunan.
3. Migrasi: perpindahan penduduk memengaruhi distribusi dan jumlah penduduk suatu wilayah, baik itu bersifat permanen atau sementara.

Jumlah penduduk di suatu daerah merujuk pada keseluruhan populasi yang tinggal di wilayah tersebut, yang terdiri dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan latar belakang sosial. Peningkatan jumlah penduduk yang cepat dapat mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya akan memacu kegiatan ekonomi, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi. Namun, apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan pengelolaan yang efektif, seperti penyediaan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien, hal ini justru bisa memberikan beban pada ekonomi daerah dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

## 2.5 Inflasi

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang merujuk pada peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mengarah pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Faktor-faktor ini bisa berasal dari sisi biaya produksi yang meningkat, tingginya permintaan, atau jumlah uang yang beredar yang tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar.

Inflasi merupakan penurunan nilai uang akibat beredarnya uang dalam jumlah yang banyak dan cepat, yang mengurangi daya beli masyarakat dan menyebabkan harga barang meningkat (Rangkuty, et al., 2024). Selain itu, inflasi merupakan kondisi perekonomian yang ditandai dengan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka panjang, yang terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan

jumlah barang yang tersedia, serta memengaruhi kestabilan daya beli masyarakat.

Menurut Mahendra (2020), inflasi dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan tingkat kenaikan harga, yaitu inflasi ringan (di bawah 10%), inflasi sedang (10% hingga 30%), inflasi berat (30% hingga 100%), dan hiperinflasi (di atas 100%). Inflasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor utama seperti tingginya permintaan barang dan jasa, peningkatan biaya produksi, serta beredarnya uang yang terlalu banyak dalam perekonomian.

Teori Kurva Phillips yang dijelaskan oleh Mankiw (2018) menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran yang saling berlawanan arah. Kurva ini menunjukkan bahwa inflasi dan pengangguran bergerak dalam arah yang berlawanan, yang menggambarkan *trade-off* dalam kebijakan ekonomi jangka pendek. Dalam versi modernnya, Kurva Phillips menjelaskan bahwa inflasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Inflasi yang diharapkan,
2. Perbedaan pengangguran dari tingkat alami (pengangguran siklis),
3. Guncangan penawaran.

Inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa akan naik, sementara pendapatan tetap atau tidak naik sebanding dengan harga yang terus meningkat. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, yang dapat mengarah pada penurunan kualitas hidup. Kelompok menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan pendapatan sangat merasakan dampak ini karena mereka tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini juga dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi.

Selain itu, inflasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Sebagian pihak mungkin akan diuntungkan oleh inflasi, seperti pengusaha

yang dapat menaikkan harga jual barang dan jasa, tetapi di sisi lain, mereka yang bergantung pada gaji tetap atau pendapatan yang tidak terhubung langsung dengan kenaikan harga akan merasa dirugikan. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan bagi kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah.

Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian tumbuh lebih cepat daripada kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa yang cukup (Oktiani & Al Muhariah, 2021). Ketika jumlah uang yang tersedia di masyarakat melebihi barang dan jasa yang dapat diproduksi atau disediakan, permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat, tetapi penawarannya terbatas. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, yang menyebabkan inflasi.

Salah satu faktor yang dapat memicu inflasi adalah kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang memperbanyak jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, seperti penurunan suku bunga atau pencetakan uang baru oleh bank sentral. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk merangsang perekonomian, dalam jangka panjang, jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, dapat menyebabkan inflasi yang tinggi.

Oleh karena itu, pengendalian inflasi memerlukan kebijakan yang seimbang antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Pemerintah dan bank sentral perlu memastikan bahwa jumlah uang yang beredar tidak melebihi kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kebijakan moneter yang hati-hati dan pengelolaan yang baik terhadap pasokan barang dan jasa sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah dampak negatif inflasi terhadap masyarakat, terutama yang rentan secara ekonomi.

Inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD. Meskipun inflasi dapat meningkatkan nominal pendapatan dari pajak dan retribusi karena kenaikan harga barang

dan jasa, hal ini tidak selalu berujung pada peningkatan penerimaan daerah yang diharapkan. Jika inflasi tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang baik, maka konsumsi masyarakat akan menurun, yang pada gilirannya dapat mengurangi transaksi ekonomi dan berdampak negatif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memahami hubungan antara inflasi dan ekonomi lokal, serta merumuskan kebijakan yang dapat meminimalkan dampak negatif inflasi, agar kestabilan ekonomi daerah dan penerimaan daerah tetap terjaga.

## 2.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi hak-hak dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Aprillyana (2020) menyebutkan bahwa kemiskinan sebagai standar hidup rendah yang terlihat dari kekurangan materi. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Penyebab kemiskinan antara lain ketidaksamaan kepemilikan sumber daya, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan perbedaan akses modal (Fitriyani & Handayani, 2021). Menurut Priambodo (2022) menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara efektif. Andina & Wahyudi (2024) mengklasifikasikan kemiskinan menjadi lima kategori:

1. Kemiskinan Absolut, selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang tidak mengacu atau tidak didasarkan pada garis kemiskinan.
2. Kemiskinan Relatif, apabila pendapatan sekelompok orang dalam masyarakat lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka termasuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Penekanannya adalah adanya ketimpangan pendapatan

dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

3. Kemiskinan Struktural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
4. Kemiskinan Kronis, dibedakan tiga berdasarkan penyebabnya yaitu:
    a. Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif.
    b. Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian (daerah-daerah yang kritis akan sumber daya alam dan daerah terpencil)
    c. Rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
5. Kemiskinan Sementara, terjadi akibat adanya perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman, dan bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Izudin (2022) masalah kemiskinan dan penyebabnya masih menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan pembangunan. Beberapa ciri kemiskinan yang umum digunakan untuk menentukan kondisi miskin adalah:

1. Tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal, peralatan kerja, atau keterampilan yang cukup;
2. Tingkat pendidikan yang rendah;
3. Bekerja di sektor informal dengan modal kecil, seringkali disebut setengah menganggur;
4. Tinggal di daerah pedesaan atau kawasan yang jauh dari pusat pertumbuhan regional, atau di kawasan kumuh perkotaan;
5. Kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok dan pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan standar kesejahteraan.

Kemiskinan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pertama, kemiskinan yang timbul karena keterbatasan sumber daya, baik modal maupun sumber daya manusia (seperti keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan), serta keterbatasan akses akibat lokasi geografis yang terpencil; kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata (Syahri & Gustiara, 2020).

Indikator kemiskinan merupakan alat untuk memantau dan menilai tingkat kemiskinan di suatu negara. Di Indonesia, indikator ini memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur sejauh mana jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan bagaimana distribusi kemiskinan tersebut. Terdapat tiga indikator utama untuk mengukur kemiskinan di Indonesia menurut Aprillyana (2020), yaitu:

1. Angka Kemiskinan (P0):

   Angka Kemiskinan, atau yang dikenal sebagai *poverty headcount ratio* (P0), mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. P0 menunjukkan proporsi penduduk yang dikategorikan miskin menurut garis kemiskinan yang telah ditentukan.

2. Kedalaman Kemiskinan (P1):

   Kedalaman Kemiskinan, atau *poverty gap index* (P1), mengukur sejauh mana tingkat kemiskinan suatu kelompok dibandingkan dengan garis kemiskinan. P1 menggambarkan rata-rata jarak antara pendapatan atau konsumsi penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai ketimpangan kemiskinan—semakin tinggi P1, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dirasakan oleh kelompok miskin tersebut.

3. Keparahan Kemiskinan (P2):

   Keparahan Kemiskinan, atau *squared poverty gap index* (P2), mengukur tidak hanya kedalaman kemiskinan, tetapi juga ketimpangan antara penduduk miskin dengan penduduk yang lebih kaya. P2 memberikan bobot lebih pada individu yang lebih miskin, sehingga menggambarkan ketimpangan yang lebih besar dalam distribusi kemiskinan. P2 lebih sensitif terhadap ketimpangan dan memberikan gambaran lebih rinci tentang kesenjangan yang ada.

## 2.7 Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Variabel Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Jumlah penduduk berkontribusi signifikan terhadap PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi, terutama konsumsi masyarakat yang menjadi dasar penerimaan pajak dan retribusi daerah. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi keunggulan ekonomi jika diiringi dengan pengelolaan yang memadai, seperti pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung (Liana, et al., 2024). Jumlah penduduk memiliki peran penting dalam memengaruhi PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi, terutama konsumsi masyarakat yang menjadi dasar penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Menurut Liana, et al., (2024) jumlah penduduk yang besar dapat menjadi keunggulan ekonomi jika diiringi dengan pengelolaan yang memadai, seperti pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung. Rachman & Restiatun (2023) menyebutkan bahwa PAD memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah dan menjadi indikator tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber potensial PAD. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Kondisi ini mendorong peningkatan produksi, yang pada akhirnya mengakibatkan perluasan usaha dan pendirian usaha-usaha baru. Pada tahap

berikutnya, hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah juga akan meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Restiatun (2023) juga menemukan hasil bahwa jumlah penduduk memengaruhi PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktiani & Muhariah (2021) menemukan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk memberikan kontribusi positif terhadap PAD, terutama melalui pajak berbasis konsumsi masyarakat. Namun, jika tidak terkelola dengan baik, pertumbuhan penduduk dapat menjadi beban ekonomi, sebagaimana disimpulkan Priyono & Handayani (2021), yang menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia untuk efektivitas penerimaan daerah. Dengan demikian, hubungan antara jumlah penduduk dan PAD bersifat positif jika didukung oleh kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks PAD, jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui konsumsi barang dan jasa yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya konsumsi, permintaan terhadap barang dan jasa lokal juga meningkat, yang pada akhirnya akan memperluas basis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, retribusi pasar, dan pajak hiburan. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk dapat mendorong ekspansi sektor usaha dan industri yang berkontribusi terhadap penerimaan PAD dari pajak usaha dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Namun, Solow (1956) juga menekankan bahwa efek jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat linier. Jika jumlah penduduk bertambah tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan investasi dalam infrastruktur ekonomi, maka dampak positifnya terhadap PAD bisa terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola pertumbuhan penduduk secara efektif dengan menciptakan peluang ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli, sehingga berkontribusi positif terhadap PAD.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD. Priyono & Handayani (2021) menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Eks-Karesidenan Pati secara signifikan meningkatkan PAD melalui peningkatan sektor pajak daerah. Sementara itu, penelitian Oktiani & Muhariah (2021) menemukan hasil serupa di Sumatera Selatan, di mana jumlah penduduk berkontribusi terhadap peningkatan pajak daerah dan retribusi. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan, jumlah penduduk dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan PAD suatu daerah. Namun, dampaknya bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengelola pertumbuhan penduduk tersebut

2. Hubungan Variabel Inflasi Terhadap PAD

Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD melalui pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah (Andriyansyah & Athoillah, 2024). Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa mengalami kenaikan, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi dan berdampak pada penurunan penerimaan pajak serta retribusi, yang merupakan sumber utama PAD (Raysharie, et al., 2023). Inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan melemahkan kontribusi masyarakat terhadap PAD.

Inflasi moderat dapat memberikan dampak positif dalam situasi tertentu. Kenaikan harga barang dan jasa dapat meningkatkan nominal penerimaan pajak berbasis harga, seperti pajak konsumsi dan penjualan (Watulingas, et al., 2021). Menurut Purbaningrum & Nurhayati (2022) inflasi yang terkendali dapat menciptakan peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga mendukung penerimaan PAD. Sebaliknya, inflasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, menurunkan daya saing daerah, menghambat investasi, dan mengurangi potensi pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernita (2021) di Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan fluktuasi harga yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat dan pendapatan pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2021) di Provinsi Aceh menemukan bahwa inflasi yang terkendali tidak memberikan dampak negatif yang signifikan pada PAD, sementara inflasi yang tinggi justru menekan daya beli masyarakat dan menurunkan aktivitas ekonomi lokal.

Menurut Fisher Effect (Fisher, 1930), inflasi memengaruhi daya beli dan nilai uang dalam jangka panjang, yang berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan pajak berbasis harga, tetapi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, daya beli akan melemah, mengurangi transaksi ekonomi dan menekan PAD.

Berdasarkan uraian diatas, hubungan antara inflasi dan PAD bersifat kompleks, bergantung pada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali dapat meningkatkan PAD, sementara inflasi yang tidak terkendali dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kontribusi fiskal. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi yang efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mengoptimalkan PAD.

3. Hubungan Variabel Tingkat Kemiskinan Terhadap PAD

Tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan dengan PAD, hal ini ditunjukkan dengan kemiskinan yang tinggi mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi dan menyebabkan berkurangnya kontribusi langsung masyarakat terhadap PAD (Adella, 2023). Selain itu, kemiskinan yang tinggi meningkatkan kebutuhan akan subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah daerah, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis yang berpotensi meningkatkan PAD.

Menurut Aisyah, et al., (2023) menyebutkan bahwa pengurangan tingkat kemiskinan dianggap penting untuk meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat. Masyarakat yang lebih sejahtera memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mendorong peningkatan konsumsi dan pembayaran pajak daerah. Hal ini menciptakan efek positif pada penerimaan PAD, karena peningkatan daya beli masyarakat memperluas basis pajak dan retribusi yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2022) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap PAD di Kabupaten Purbalingga. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1% dapat meningkatkan PAD sekitar 43,69%. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga memberikan keuntungan fiskal bagi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti & Handayani (2021) menyimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan dapat memperkuat potensi kontribusi masyarakat terhadap PAD, karena masyarakat yang lebih makmur mampu berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi secara optimal.

Semakin besar jumlah penduduk dengan daya beli tinggi, semakin besar potensi penerimaan PAD melalui pajak daerah dan retribusi. Selain itu, pertumbuhan usaha dan industri yang didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakat juga meningkatkan penerimaan pajak dari sektor bisnis dan properti. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat melemahkan kapasitas fiskal daerah karena rendahnya daya beli masyarakat, berkurangnya konsumsi, serta meningkatnya beban anggaran untuk bantuan sosial. Jumlah penduduk yang besar berpotensi meningkatkan PAD jika didukung daya beli yang kuat, sementara tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang tepat agar kapasitas fiskal daerah dapat dioptimalkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Machfud & Asnawi, 2024) juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap PAD. Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin besar potensi peningkatan PAD melalui partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan pengurangan beban subsidi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

## 2.8 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji peran penting PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di Kota Metro, Provinsi Lampung. Meskipun PAD Kota Metro mengalami peningkatan, pengoptimalan PAD masih terkendala oleh beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada jenis pajak tertentu, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, serta pengelolaan yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi PAD, dengan fokus pada jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang lebih besar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan ini bisa menjadi beban bagi penyediaan layanan publik dan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat menghambat kontribusi ekonomi masyarakat. Inflasi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, yang dapat memengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Inflasi yang terkontrol dapat mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi menghambat kemampuan masyarakat untuk berkontribusi melalui pajak dan retribusi, serta meningkatkan kebutuhan akan subsidi dan pengeluaran sosial, yang dapat mengurangi anggaran untuk pembangunan ekonomi. Pengurangan tingkat kemiskinan berpotensi meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat dan

memperbesar potensi PAD. Berdasarkan uraian di atas, kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

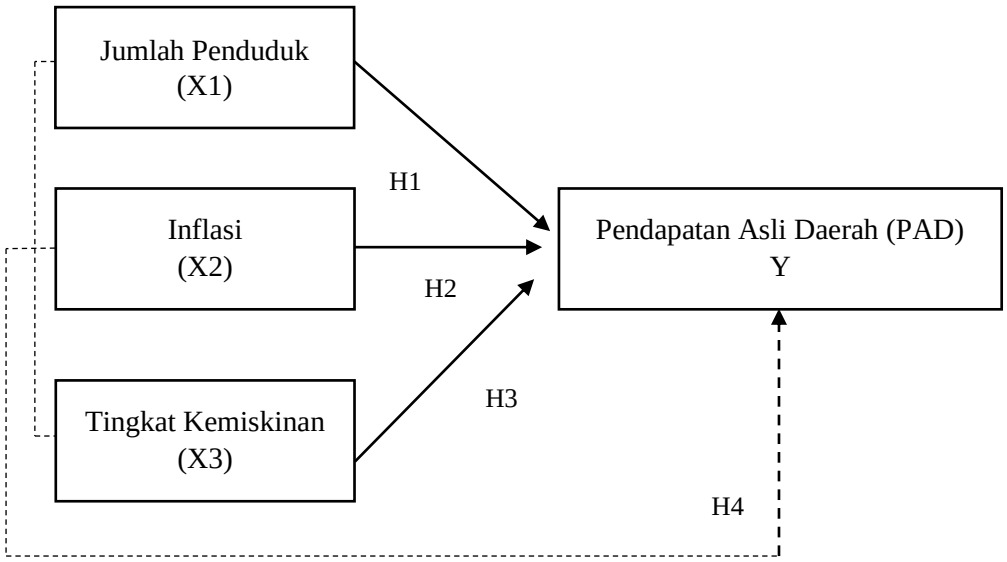


**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Data diolah peneliti, 2024.*

**Keterangan:**

Parsial : ——————

Simultan : ----------

## 2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui pengumpulan informasi (Sugiyono, 2020). Berdasarkan hubungan antarvariabel dalam kerangka pemikiran penelitian di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$Ha_1$: Terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 2023.

$Ho_1$: Tidak terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 2023.

$Ha_2$: Terdapat pengaruh antara inflasi terhadap PAD Kota Metro tahun 2020—2023.

$Ho_2$: Tidak terdapat pengaruh antara inflasi terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 2023.

$Ha_3$: Terdapat pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 2023.

$Ho_3$: Tidak terdapat pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 2023.

$Ha_4$: Terdapat pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 2023.

$Ho_4$: Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 2023.

# III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data berbentuk angka yang dianalisis secara statistik, serta bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dalam rangka menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam pengaruh jumlah penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro pada tahun 2018 – 2023.

## 3.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sesuatu yang dirumuskan oleh peneliti untuk dipelajari guna memperoleh informasi mendalam terkait hal tersebut, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, definisi konseptual menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian teoritis yang mencakup:

1. Jumlah Penduduk: merujuk pada keseluruhan individu yang tinggal di wilayah tertentu yang dihitung melalui sensus penduduk. Menurut BPS, jumlah penduduk mencerminkan kapasitas suatu wilayah untuk memanfaatkan sumber daya manusia dalam mendukung aktivitas ekonomi.
2. Inflasi: mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Inflasi memengaruhi

daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, yang menjadi faktor penting dalam pengumpulan PAD.

3. Tingkat Kemiskinan: merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar minimal. Tingkat kemiskinan mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan memengaruhi kontribusi mereka terhadap PAD.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD): merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

## 3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran mengenai suatu variabel yang mencakup indikator-indikator yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai variabel tersebut (Sugiyono, 2020). Definisi operasional menjabarkan bagaimana variabel-variabel penelitian ini diukur dengan:

1. Jumlah Penduduk (X1)

   Diukur berdasarkan data sensus penduduk tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro pada periode 2018 – 2023.
2. Inflasi (X2)

   Diukur melalui tingkat inflasi tahunan di Kota Metro, yang dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari data BPS untuk periode 2018 – 2023.
3. Tingkat Kemiskinan (X3)

   Diukur menggunakan persentase penduduk miskin terhadap total populasi Kota Metro, berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS untuk periode 2018 – 2023.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

   Diukur berdasarkan realisasi penerimaan PAD Kota Metro yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya, untuk periode 2018 – 2023.

## 3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait suatu permasalahan yang sedang diteliti. Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab masalah yang diangkat. Lokasi penelitian ini berada di Pemerintah Daerah Kota Metro pada tahun 2018 – 2023, waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tahun 2025.

## 3.5 Sumber Data

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2020). Data sekunder juga merupakan data yang mengacu pada kumpulan informasi dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitan ini, data sekunder diperoleh dari referensi pada buku seperti teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mencari data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta data yang diperoleh melalui berbagai sumber antara lain seperti buku, jurnal penelitian tentang jumlah penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, dan PAD, serta internet.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang digunakan. Data sekunder merujuk pada sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan historis yang dapat diakses melalui Bps.go.id dan situs web resmi perusahaan. Selain itu, sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, artikel jurnal, dan berbagai sumber internet.

## 3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

   Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah yang secara general terdiri dari subjek dan objek yang terdapat karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dapat dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah data statistik jumlah penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, dan PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023.

2. Sampel

   Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive.* Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang pengambilan sampelnya tidak memberi peluang yang sama pada tiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel dan bersifat khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar nantinya dapat mencapai tujuan dan mendapat permasalahan yang ada pada penelitian (Sugiyono, 2020). Adapun kriteria sampel pada penelitian adalah:

   1. Data tahunan mengenai variabel yang diteliti (jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, inflasi, dan PAD) tahun 2018 – 2023.
   2. Data berasal dari sumber yang sah dan terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, atau instansi pemerintah terkait yang memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang diteliti.
   3. Penelitian hanya menggunakan data yang tervalidasi dan diterbitkan dalam periode 2018 – 2023.

## 3.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data sekunder, seperti laporan keuangan. Proses

pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menganalisis laporan keuangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

## 3.8 Variabel Penelitian

### 3.8.1 Variabel Independen

Variabel independen, yang juga dikenal sebagai variabel bebas, adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2020). Variabel ini biasanya dilambangkan dengan "X". Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari X1 yaitu jumlah penduduk, X2 yaitu inflasi, dan X3 yaitu tingkat kemiskinan.

### 3.8.2 Variabel Dependen

Variabel dependen, atau sering disebut variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020). Variabel ini dilambangkan dengan "Y". Pada penelitian ini, variabel dependen adalah PAD.

## 3.9 Teknik Analisis Data

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian dengan memanfaatkan program analisis data *Eviews*. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

### 3.9.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan untuk persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan adalah uji normalitas, uji linearitas dan uji multikonieritas.

1. **Uji Normalitas**

   Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang telah diperoleh menyebar mengikuti distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021). Adapun pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov. Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji

membedakan antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikan di atas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal
b. Jika nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

**2. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi dapat terjadi karena adanya data yang berurutan setiap tahunnya dan saling terkait satu sama lain. Fenomena ini biasanya ditemukan pada data deret waktu (Ghozali, 2021). Keputusan dalam uji autokorelasi dapat diambil dengan memeriksa nilai prob F atau *Chi Square* yang kurang dari 0,05, yang menandakan adanya gejala autokorelasi.

**3. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah didalam korelasi atau kolinearitas antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance.

1. Jika VIF < 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas.
2. Jika VIF > 10 maka terjadi Multikolinearitas.

**4. Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varians dan residual antar pengamatan konsisten atau tetap, maka disebut sebagai Homoskedastisitas, sementara jika berbeda, disebut Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2021). Keputusan dalam uji heteroskedastisitas diambil berdasarkan hal berikut:

a. Jika nilai signifikansi > 0,05, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas.
b. Jika nilai signifikansi < 0,05, berarti terdapat masalah heteroskedastisitas.

### 3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan garis lurus/linier antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya (Ghozali, 2021). Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Analisis regresi linier berganda dibantu dengan menggunakan aplikasi olah data *Eviews*. Teknik analisis regresi linier berganda ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari X terhadap Y.

**Model persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:**

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

| | |
|---|---|
| Y | : Pendapatan Asli Daerah |
| $\alpha$ | : Konstanta |
| $\beta_1$ $\beta_2$ | : Koefisiensi regresi dari masing-masing variabel independen |
| $X_1$ | : Jumlah Penduduk |
| $X_2$ | : Inflasi |
| $X_3$ | : Tingkat Kemiskinan |
| e | : *Margin of eror* |

### 3.9.3 Uji Hipotesis

**1. Uji Parsial (Uji T)**

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji-t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel terikat terhadap variabel terikat saja terhadap variabel terikat. Dengan ketentuan berikut berdasarkan nilai signifikansi

1. Jika nilai Sig < 0.05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis di terima
2. Jika nilai Sig > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis ditolak

**2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel bebas dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2021). Dengan ketentuan berikut berdasarkan nilai signifikansi a) Jika nilai Sig < 0.05 maka X secara simultan berpengaruh terhadap Y atau hipotesis di terima. b) Jika nilai Sig > 0.05 maka X secara semultan tidak berpengaruh terhadap Y.

**3. Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$)**

Koefisien Determinasi digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Besar nilainya kisaran 0-1. Apabila koefisien determinasi (R2) mendekati nol maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas sebaliknya Apabila koefisien determinasi (R2) mendekati satu menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat (Sugiyono, 2020).

Tabel 5. Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|---|---|
| 0,00 – 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |

*Sumber: Sugiyono, 2020.*

# V. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro pada periode 2018–2023. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara Parsial, Pengaruh Variabel Independen terhadap PAD adalah sebagai berikut:

   a. Jumlah Penduduk

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Metro, dengan nilai t-hitung sebesar 10.681,68 dan probabilitas 0,0087. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin besar potensi penerimaan PAD, terutama melalui pajak daerah dan retribusi yang diperoleh dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dari ketiga variabel yang diteliti, jumlah penduduk merupakan faktor yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap PAD. Dalam konteks kebijakan publik, temuan ini menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan kependudukan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan penguatan sektor informal. Dengan mengarahkan pertumbuhan penduduk menjadi sumber daya produktif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi fiskal dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif.

   b. Inflasi

      Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, dengan nilai t-hitung sebesar -4.818,544 dan probabilitas 0,0405. Kenaikan

inflasi cenderung menurunkan daya beli masyarakat, menghambat konsumsi, dan melemahkan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kebijakan fiskal dan moneter daerah yang bersinergi dalam menjaga stabilitas harga. Upaya ini juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas lembaga daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang adaptif terhadap tekanan ekonomi.

c. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan nilai t-hitung sebesar 4.245,205 dan probabilitas 0,0513. Meskipun secara teoritis kemiskinan yang tinggi dapat mengurangi kontribusi masyarakat terhadap PAD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampaknya masih terbatas. Hal ini mungkin disebabkan karena struktur PAD Kota Metro lebih ditopang oleh sektor usaha formal dan kelompok masyarakat berdaya beli tinggi. Dari perspektif kebijakan publik, hasil ini menjadi dasar bagi evaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang selama ini lebih bersifat konsumtif. Perlunya transformasi kebijakan sosial ke arah program berbasis pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian masyarakat miskin sebagai strategi jangka panjang yang tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga memperluas basis pajak dan retribusi daerah.

2. Secara simultan, berdasarkan hasil analisis, jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Metro. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi dan demografi secara kolektif memegang peranan penting dalam menentukan kapasitas fiskal daerah. Dengan arah kebijakan yang tepat, tidak hanya PAD dapat meningkat secara berkelanjutan, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan lebih terjamin.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik dalam aspek praktis bagi pemerintah Kota Metro maupun aspek teoritis untuk penelitian selanjutnya.

a. Aspek Praktis

1. Pemerintah Kota Metro perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, memperluas lapangan kerja dengan mendukung pertumbuhan UMKM melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan kemudahan perizinan guna meningkatkan produktivitas penduduk terhadap aktivitas ekonomi daerah.
2. Pemerintah Kota Metro perlu memperkuat pengendalian inflasi dengan memanfaatkan sistem pemantauan harga berbasis digital dan mengevaluasi program ketahanan pangan secara berkala, untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas PAD dari sektor perdagangan dan konsumsi.
3. Kebijakan program bantuan sosial perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, dengan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pendampingan usaha, agar dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pemerintah Kota Metro perlu inovasi kebijakan dalam optimalisasi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi fiskal, sekaligus mendukung pengembangan sumber PAD lain seperti pengelolaan aset daerah, sektor pariwisata berbasis potensi lokal.

b. Aspek Teoritis

Penelitian ini hanya mencakup variabel jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti investasi, pengangguran, pendapatan per kapita, atau kebijakan fiscal untuk melihat faktor lain berperan terhadap PAD. Selain itu, penggunaan data dengan rentang waktu yang lebih panjang akan membantu mengidentifikasi tren jangka panjang yang memengaruhi PAD.

# DAFTAR PUSTAKA


Adella, A. V. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2022 Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Ahmad, A. H. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, *2*(1), 50-61.

Aini, Q. (2021). *Penggunaan Sensus De Jure Dalam Mempermudah Pengolahan Data Dan Analisis Data Kependudukan Mata Pelajaran Geografi Kelas XI Di SMA Plus Al-Waroqot* (Doctoral Dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).

Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, *2*(12), 3722-3736.

Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. H. J., & Barki, K. (2023). Implementasi Pendekatan Community Empowerment Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah. *Journal Of Scientech Research And Development*, *5*(1), 65-76.

Almaya, U. N., Rianto, W. H., & Hadi, S. (2021). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Inflasi, Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, *5*(2), 262-278.

Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 48-54.

Amp.Kontan.Co.Id. 2024. Https://Amp.Kontan.Co.Id/News/Indonesia-Jadi-Negara-Dengan-Ekonomi-Terbesar-Di-Asia-Tenggara-Pada-2023. Diakses Pada 30 Oktober 2024.

Amsyah, U., & Sudardi, S. (2025). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Era Desentralisasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 14-27.

Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *9*(01), 69-80.

Andriana, P. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Doctoral Disertation Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan*.

Andriansyah, A. S., & Athoillah, M. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Inflasi Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Malang Tahun 2012-2021. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, *3*(2), 552-567.

Anggaran.Kemenkeu.Go.Id.2021.Https://Anggaran.Kemenkeu.Go.Id/In/Post/Tantangan-Pemulihan-Ekonomi-Setelah-Dua-Tahun-Penanganan-Pandemi. Diakses Pada 30 Oktober 2024.

Aprillyana, N. (2020). Estimasi Indikator Kemiskinan Tingkat Kecamatan Menggunakan Regresi Kekar M-Kuantil. *J. Litbang Sukowati*, *3*(2), 1-17.

Arif, N. (2024). *Pengaruh Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Konawe Kepulauan Dan Buton Tengah Periode 2017-2023* (Doctoral Dissertation, IAIN Kendari).

Artana, I. W., & Karmini, N. L. (2024). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Bekerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 7670-7680.

Assagaf, M., Hidayat, Y., & Wahab, A. (2020, November). Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan Berorientasi Potensi Dan Karekteristik Wilayah Maluku Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis* (Vol. 1, No. 1).

Asep Deni, M. M., Hirbasari, I. A., Taryono, S. E., Iswahyudi, M. S., Heppi Syofya, S. E., Soeharjoto, S. E., & Humaidah Muafiqie, S. E. (2024). *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN*. CV Rey Media Grafika.

Bpkad.Kota Metro. 2023. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro. Https://Bpkad.Metrokota.Go.Id/, Diakses Pada 29 Oktober 2024.

Bps.Go.Id. 2024. Jumlah Penduduk Kota Metro. Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Tabel/2/Mtk3nsmy/Jumlah-Penduduk-Pertengahan-Tahun--Ribu-Jiwa-.Html Diakses Pada 30 Oktober 2024.

Bps Kota Metro. 2023. Inflasi Kota Metro. Https://Lampung.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Tabel/2/Mjazizi=/Inflasi-Kota-Metro.Html. Diakses Pada 1 November 2024.

Bps Kota Metro. 2023. Statistik Daerah Metro Kota 2023. Https://Metrokota.Bps.Go.Id/Id/Publikation/2023/12/28/53a8141c1bbafeb0

45e78ff1/Statistik-Daerah-Kota-Metro-2023.Html. Diakses Pada 1 November 2024.

Bps.Go.Id. 2021. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa). Https://Luwukab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Tabel/2/Mjeyizi=/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kelompok-Umur.Html. Diakses Pada 1 November 2024.

Budiharjo. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. In Ebook (Hal. 245). Samudra Biru

Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran. Yogyakarta*: Pustaka Pelajar.

Darwin Lie, S. E., MM, L. E. N., Nana Triapnita Nainggolan, S. E., MM, L. D. S., SE, M. A., & Hery Pandapotan Silitonga, S. E. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. CV. Azka Pustaka.

Deno, A., Djou, L. D. G., & Ismail, N. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 24-31.

Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah*. Ahli Media Book.

Eduar, R. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 72-80.

Ernita, D. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *Bussman Journal: Indonesian Journal Of Business And Management*, *1*(1), 63-73.

Fitri, N. (2021). *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Aceh* (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry).

Fisher, I. (1930). *The Theory Of Interest*. Macmillan.

Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal Of Economics*, *9*(2), 79-90.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Badan* Penerbit Universitas Diponegoro.

Gimnastiar, I. (2024). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kota/Kabupaten Di Jawa Barat Yang Berbatasan Langsung Dengan Kota Bandung* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Gusti, S. H. (2024). Kontribusi PDRB, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(5), 5342-5353.

Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, *3*(2), 182-191.

Hamzah, M., Syukur, Et Al. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Terhadap Sektor Domestik Dan Stabilitas Inflasi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, *2*(3), 382-388.

Handayani, R. (2024). *Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan* (Doctoral Dissertation, Fakultas Sosial Sains).

Hendriyani, N., & Adi, S. W. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada DPPKAD, BAPPEDA, Dan BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2015) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Hildawati, H., Erlianti, D., Mursalim, S. W., Fallz, I., Puspadewi, E., Sintari, S. N. N., & Islah, K. (2024). *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ichsan, R. N., SE, M., Lukman Nasution, S. E. I., & Sarman Sinaga, S. E. (2021). *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Info.Metro Kota.Go.Id. 2024. Https://Info.Metrokota.Go.Id/Alami-Meningkatan-Bpprd-Kota-Metro-Dalam-Tingkatkan-Pad/

Izudin, A. (2022). *Analisis Perencanaan Kebijakan Dan Pelayanan Sosial*. Prenada Media.

Jatnika, I., Suryadi, D., & Suryadi, E. E. (2024). *Membangun Kemandirian Keuangan Daerah: Kasus Pendapatan Asli Dan Belanja Modal Pemda Purwakarta*. MEGA PRESS NUSANTARA.

Keynes, J. M. (1936). *The General Theory Of Employment, Interest And Money*. Palgrave Macmillan.

Kodu, A. R., Heri, H., Hasibuan, R. J. F., & Sunarsih, U. (2025). Pandangan Kenaikan Tarif PPN 12% Dengan Menggunakan Sistem Coretax: Implikasi Pada UMKM Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *10*(1).

Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. (2024). Peran Inovasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan Menuju Visi Indonesia Maju 2045. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(2), 114-129.

Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., ... & Milia, J. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Lusiana, F. O., Fatma, I., & Windarto, A. P. (2021). Estimasi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Pada BPS Simalungun. *Journal Of Informatics Management And Information Technology*, *1*(2), 79-84.

Machfud, M., & Asnawi, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, *5*(1), 14-31.

Mahendra, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 174-186.

Manangin, Y. A. M., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *11*(1), 1160-1170.

Mare, G. W., & Rahayaan, D. Y. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 160-172.

Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JISAMAR (Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research)*, *5*(2), 390-399.

Mitha, F. (2022). *Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2006-2020 Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Publik Finance In Theory And Practice* (5th Ed.). Mcgraw-Hill.

Oktiani, A., & Al Muhariah, N. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sumatera Selatan. *KLASSEN| Journal Of Economics And Development Planning*, *1*(1), 16-36.

Pradana, Z. A., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh Pendidikan, PDRB, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 16*(2), 55-62.

Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, *1*(1), 37-56.

Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1).

Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Yogyakarta Tahun 2018—2021. *SEIKO: Journal Of Management & Business*, *5*(2), 77-85.

Priambodo, A. (2022). Kontribusi Tingkat Kemiskinan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Purbalingga. *Perwira Journal Of Economics & Business*, *2*(1), 65-71.

Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018. *Diponegoro Journal Of Economics*, *10*(2).

Purbaningrum, W. T., & Nurhayati, S. F. (2022). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Karesidenan Semarang Tahun 2016-2020* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Purba, E., & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ekuilnomi*, *5*(1), 1-8.

Rachman, A., & Restiatun, R. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat. *Sebatik*, 27(2), 699–707.

Rahmayani, D., Nihayah, A. N., Rachman, M. A., & Rosalia, A. C. T. (2025). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Aplikasi, Dan Kajian Empiris*. Penerbit NEM.

Rangkuty, D. M., Irmayunda, L., & Saputra, J. (2024). Analisa Perbandingan Trend Laju Inflasi Di Indonesia Dan Malaysia. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, *2*(1), 237-243.

Raysharie, P. I., Apriliana, A., Takari, D., & Nasrida, M. F. (2023). Analisis Dampak Inflasi, PAD Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2014-2020. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, *1*(2), 57-73.

Rinanda, T., & Pangeran, P. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Distribusi Pendapatan. *All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Sosiety*, *3*(4), 50-56.

Rizani, A., Norrahman, R. A., Et Al. (2023). Efek Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, *1*(2), 344-358.

Rukmana, S. H., & Imaningsih, N. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2002-2021. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, *6*(2), 826-833.

Salim, A., & Khoirudin, R. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua Dan Papua Barat. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).

Salsabilah, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Saputra, I., Supeno, B., & Wardi, J. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. *Jurnal Komunitas Sains Manajemen, 2*(2), 234-150.

Sari, Y., Halim, A., Mustika, et al. (2022). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Tebo. *Jurnal Development, 10*(2), 49-63.

Sari, L. P., Auliyani, M., & Jannah, N. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. *Journal Of Innovation Research And Knowledge, 1*(7), 411-418.

Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Management: Small And Medium Enterprises (Smes), 13*(3), 327-340.

Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2), 52-62.

Siregar, W., Prilia, F. I., Fatimah, F., & Asnidar, A. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pajak Daerah Serta Kemiskinan Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Gorontalo. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, 3*(1), 368-388.

Siringoringo, R. S. (2024). *Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan* (Doctoral Dissertation, Universitas HKBP Nommensen).

Suaidah, S., Harahap, I., Et Al. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Edunomika, 7*(1).

Solow, R. (1956). A Contribution To The Theory Of Economic Growth. *Quarterly Journal Of Economics, 70*(1), 65–94.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, *1*(1), 34-43.

Syahrullah, M. (2022). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Tallesang, U. H. (2024). Pengaruh Investasi Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Timur. *The Effect Of Investment And Open Unemployment Rate On Local Revenue In East Luwu Regency* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Tradinatama, S., & Solikin, A. (2023). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *8*(3), 235-250.

Ulia, A. R., Rayyan, S., & Ratnawati, E. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat Dengan Redistribusi Pendapatan Nasional. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(10), 8090-8099.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Menjelaskan Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Usman, U., Wartoyo, W., Et Al. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *12*(1), 108-126.

Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *4*(2), 101-113.

Watulingas, C. A. S., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *19*(3), 104-117.

Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). *Ekonomi Publik*. Penerbit NEM.